

Abstract

Indonesia since the 1945 Constitution which was implemented in 1999-2002 has chosen the Presidential System in the practice of state administration. Presidential logistics system is that the President is no longer the mandate of the People's Consultative Assembly, but directly as the mandate of the people who are directly elected as a form of Democracy. The presidential threshold chosen as an effort to strengthen the Presidential system which is applied to simultaneous general elections is the choice of legislators. This study uses a normative juridical method combined with a conceptual approach and utilizes secondary qualitative data. This study conclude, first, how the implementation and influence of the Presidential Threshold in general elections simultaneously. Second, how is the constitutional view of the Presidential Threshold in the general election simultaneously.

Keywords: *Democraton, Presidential Threshold, Election*

Abstrak

Indonesia sejak perubahan UUD 1945 yang dilaksanakan tahun 1999-2002 telah memilih sistem Presidensial dalam praktik ketatanegaraan. Konsekuensi logis sistem Presidensial adalah Presiden tidak lagi sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, melainkan langsung sebagai mandataris dari rakyat yang dipilih secara langsung sebagai bentuk Demokrasi. *Presidential threshold* yang dipilih sebagai upaya penguatan sistem Presidensial yang diterapkan pada pemilihan umum serentak menjadi pilihan pembentuk undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang digabungkan dengan pendekatan konseptual dan memanfaatkan data kualitatif bersifat sekunder. Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, bagaimana penerapan dan pengaruh *Presidential Threshold* dalam pemilihan umum serentak. *Kedua*, bagaimana pandangan konstitusional terhadap *Presidential Threshold* dalam pemilihan umum serentak.

Kata kunci: *Demokrasi, Presidential Threshold, Pemilihan Umum*